



Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah
ISSN: 2527 - 6344 (Printed), ISSN: 2580 - 5800 (Online)
Accredited No. 204/E/KPT/2022
DOI: <https://doi.org/10.30651/jms.v10i4.27401>
Volume 10, No. 4, 2025 (2655-2660)

IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS DALAM SISTEM PENGGAJIAN ASN DI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SUKABUMI

Danisa Apriliyanti Saputri

Universitas Muhammadiyah Sukabumi
denisaapriyanti@gmail.com

Elan Eriswanto

Universitas Muhammadiyah Sukabumi
elaneriswanto@ummi.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akuntabilitas dalam sistem penggajian ASN serta menilai kompetensi pengelola keuangan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penggajian telah mengacu pada prinsip akuntabilitas publik melalui dimensi program, proses, hukum, dan kebijakan. Pemanfaatan aplikasi SIPKD dan SIPD mendukung akuntabilitas secara sistematis dan transparan. Kompetensi pengelola keuangan dinilai memadai dengan dasar teori UTAUT dan kerangka kompetensi IFAC yang menekankan sinergi antara teknologi dan sumber daya manusia.

Kata kunci: akuntabilitas, penggajian ASN, kompetensi SDM, SIPKD, SIPD

Abstract

This study aims to analyze the implementation of accountability in the ASN payroll system and assess the competence of financial managers at the Sukabumi City Education and Culture Office. A descriptive qualitative approach was used with a case study method. Data were collected through interviews, observations, and documentation. The results of the study indicate that the payroll system has referred to the principles of public accountability through the dimensions of programs, processes, laws, and policies. The use of SIPKD and SIPD applications supports accountability systematically and transparently. The competence of financial managers is considered adequate based on the UTAUT theory and the IFAC competency framework that emphasizes the synergy between technology and human resources.

Keywords: accountability, ASN payroll, HR competency, SIPKD, SIPD

1. Pendahuluan

Akuntabilitas merupakan prinsip fundamental dalam pengelolaan keuangan sektor publik yang menekankan pentingnya transparansi, kejujuran, dan tanggung jawab atas setiap penggunaan sumber daya publik. Dalam ranah pemerintahan, akuntabilitas keuangan tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga mencerminkan kualitas tata kelola yang dilakukan oleh institusi publik (Mardiasmo, 2018). Pemerintah daerah dituntut untuk tidak hanya menyusun laporan keuangan yang tepat waktu, tetapi juga akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan lembaga pengawas seperti BPK dan Inspektorat (Binus University, 2021).

Dalam konteks daerah, penggajian Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu komponen terbesar dari belanja daerah. Proses ini mencakup perencanaan anggaran, verifikasi data pegawai, hingga pencairan dana yang harus dikelola secara sistematis dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ketepatan pembayaran gaji tidak hanya memengaruhi kesejahteraan ASN, tetapi juga berimplikasi pada stabilitas layanan publik yang mereka berikan. Oleh karena itu, sistem penggajian harus dikelola secara transparan, efisien, dan akuntabel (Peraturan Pemerintah (PP) No. 71, 2010).

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani jumlah ASN terbanyak, khususnya dari unsur tenaga pendidik dan kependidikan. Setiap bulan, bagian keuangan dinas bertanggung jawab menyusun dan memproses penggajian pegawai melalui sistem informasi berbasis aplikasi SIPKD dan SIPD. Proses tersebut mencakup input data, validasi status kepegawaian, serta penyusunan dokumen pembayaran seperti SPP dan SPM. Jika sistem penggajian ini tidak dikelola secara akuntabel, maka laporan keuangan dapat mengandung ketidaktepatan informasi dan berpotensi menimbulkan temuan audit.

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan sistem penggajian di dinas tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan. Dari aspek sumber daya manusia, tidak semua pengelola keuangan memiliki latar belakang pendidikan atau pelatihan formal di bidang akuntansi dan teknologi informasi. Keterbatasan ini berdampak pada ketidaksesuaian input, keterlambatan proses, hingga risiko kesalahan administrasi. Menurut Ditjen Perbendaharaan KEMENKEU RI KPPN Cilacap (2019), kompetensi SDM merupakan faktor kritis dalam menjamin keberhasilan sistem keuangan daerah. Selain itu, masalah teknis seperti jaringan internet yang tidak stabil dan keterbatasan fitur sistem juga menjadi hambatan yang mengganggu kelancaran proses penggajian. Melalui penelitian ini, penulis berupaya mengkaji implementasi akuntabilitas dalam sistem penggajian ASN di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi, serta mengevaluasi kompetensi pengelola keuangan sebagai aktor utama yang

mengoperasikan sistem tersebut. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana prinsip-prinsip akuntabilitas yakni program, proses, hukum, dan kebijakan diimplementasikan dalam praktik sehari-hari.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan akuntansi sektor publik, serta memberikan rekomendasi praktis bagi peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik.

2. Kajian Pustaka

Penelitian ini berlandaskan pada tiga kerangka teori utama yang saling melengkapi dalam menjelaskan fenomena pengelolaan penggajian ASN secara akuntabel. Pilar pertama adalah teori akuntabilitas publik, yang menekankan bahwa setiap entitas sektor publik memiliki kewajiban moral dan administratif untuk mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan dan penggunaan anggaran kepada masyarakat sebagai pihak pemberi mandat. Menurut (Mardiasmo, 2018), akuntabilitas publik mencakup aspek laporan keuangan, pelaksanaan kebijakan, hingga efektivitas program pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Lebih lanjut, akuntabilitas tidak hanya diwujudkan dalam bentuk pelaporan formal, tetapi juga dalam bentuk keterbukaan informasi dan kemudahan akses publik terhadap hasil kinerja pemerintah.

Dalam praktiknya, akuntabilitas publik dijalankan melalui penerapan empat dimensi utama sebagaimana dikemukakan oleh Mudjiyono (2018) dalam penelitian Luqyana (2022), yaitu: (1) akuntabilitas program yang mencerminkan keberhasilan instansi dalam menjalankan tugas dan program kerja secara efisien; (2) akuntabilitas kejujuran dan hukum yang berfokus pada kepatuhan terhadap regulasi dan integritas personal; (3) akuntabilitas proses yang menunjukkan bagaimana prosedur dan mekanisme dijalankan sesuai standar operasional; dan (4) akuntabilitas kebijakan yang menjamin bahwa kebijakan yang diterapkan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat maupun DPR.

Pilar kedua adalah teori kompetensi sumber daya manusia yang dikembangkan oleh *International Federation of Accountants* (IFAC). Dalam *International federation of accountants* (2025), IFAC menetapkan bahwa seorang profesional di sektor publik wajib memiliki empat kompetensi utama: (1) keterampilan teknis yang meliputi akuntansi, pengendalian intern, dan pelaporan keuangan; (2) kemampuan memimpin dan memengaruhi yang ditunjukkan melalui kepemimpinan tim dan pengambilan keputusan yang tepat; (3) pemahaman konteks sektor publik, yaitu kemampuan memahami sistem regulasi, tujuan pelayanan publik, dan dinamika birokrasi; serta (4) orientasi terhadap nilai publik, yakni kesadaran bahwa setiap kebijakan dan kegiatan yang dilakukan harus memberikan manfaat optimal bagi masyarakat luas (IFAC, 2025).

Kompetensi SDM menjadi faktor determinan dalam menjamin efektivitas sistem informasi dan kualitas laporan keuangan pemerintah. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian oleh Ulisanti (2021), menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan antara pemanfaatan teknologi informasi dan akuntabilitas keuangan sektor publik.

Pilar ketiga yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) yang dikembangkan oleh Venkatesh et al. (2003) dalam James, (2023). Model ini mengintegrasikan delapan teori terdahulu dalam menjelaskan sejauh mana pengguna menerima dan memanfaatkan teknologi informasi. Empat konstruk utama dalam model UTAUT adalah: performance expectancy (harapan bahwa sistem akan meningkatkan kinerja), effort expectancy (kemudahan penggunaan), social influence (pengaruh sosial dari lingkungan kerja), dan facilitating conditions (kondisi yang mendukung seperti infrastruktur dan pelatihan).

Dalam konteks penggunaan aplikasi SIPKD dan SIPD, model UTAUT menjadi sangat relevan untuk mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan adopsi sistem penggajian digital oleh pengelola keuangan. Jika pengguna meyakini bahwa sistem akan mempermudah pekerjaan mereka, didukung oleh pelatihan yang memadai, dan mendapatkan dorongan dari lingkungan kerja, maka probabilitas keberhasilan implementasi sistem tersebut akan semakin tinggi (Venkatesh et al., (2003) dalam James (2023).

Dengan mengintegrasikan ketiga kerangka teori tersebut akuntabilitas publik, kompetensi SDM, dan model UTAUT penelitian ini memberikan dasar yang kuat dalam menganalisis hubungan antara teknologi, manusia, dan akuntabilitas dalam pengelolaan sistem penggajian ASN di lingkungan pemerintah daerah.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Lokasi penelitian adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Subjek penelitian meliputi Kasubbag Keuangan, Bendahara Pengeluaran, dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan melalui triangulasi sumber dan metode untuk meningkatkan validitas hasil penelitian.

4. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penggajian ASN di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi telah dijalankan secara akuntabel. Proses ini didukung oleh penerapan sistem digital berbasis aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

(SIPD) yang dikembangkan oleh pemerintah pusat. SIPKD digunakan oleh operator keuangan untuk menyusun dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM), yang kemudian diverifikasi oleh BPKPD dan dicairkan melalui Bank BJB. Sementara itu, SIPD berfungsi sebagai sistem integrasi nasional yang mencatat seluruh aktivitas anggaran dan belanja pemerintah daerah.

Implementasi sistem tersebut secara nyata mendukung akuntabilitas publik yang ditinjau dari empat dimensi utama. Pertama, akuntabilitas program tercermin dari ketepatan waktu pembayaran gaji ASN yang konsisten setiap bulan. Kedua, akuntabilitas proses diwujudkan dalam bentuk alur administrasi dan prosedur digital yang terdokumentasi dengan baik melalui aplikasi. Ketiga, akuntabilitas kejujuran dan hukum terjaga karena seluruh proses mengacu pada peraturan perundang-undangan, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Keempat, akuntabilitas kebijakan terlihat dari proses pemantauan dan pelaporan daya serap anggaran melalui dashboard SIPD yang dapat diakses secara nasional (Mudjiyono (2018) dalam penelitian Luqyana (2022)).

Selain dari sisi sistem, faktor kompetensi sumber daya manusia (SDM) juga menjadi aspek penting yang mendukung keberhasilan implementasi penggajian ASN. Berdasarkan hasil wawancara, para pengelola keuangan telah mengikuti pelatihan teknis penggunaan SIPKD dan SIPD. Mereka menunjukkan pemahaman terhadap regulasi keuangan, alur penggajian, serta mampu menjalankan koordinasi antarlembaga dengan baik. Pembagian tugas berbasis wilayah kecamatan juga mempermudah kontrol dan efisiensi kerja. Hal ini sesuai dengan teori IFAC (2025) yang menyatakan bahwa keterampilan teknis, pemahaman kontekstual, kepemimpinan, dan orientasi terhadap nilai publik merupakan kompetensi esensial yang harus dimiliki oleh tenaga keuangan sektor publik.

Selanjutnya, temuan ini juga mendukung model *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology* (UTAUT). Faktor *performance expectancy* terlihat dari harapan pegawai bahwa SIPKD/SIPD mempercepat dan mempermudah proses kerja. *Effort expectancy* juga terpenuhi karena pengguna merasa sistem mudah dipelajari. Adanya pelatihan dan dukungan dari pimpinan menandakan adanya *facilitating conditions*, sementara *social influence* tercermin dalam dorongan dari atasan dan rekan kerja untuk menggunakan sistem digital secara optimal (Venkatesh et al., 2003).

Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat hipotesis teoritis bahwa keberhasilan sistem penggajian berbasis teknologi informasi sangat bergantung pada sinergi antara sistem yang efektif dan SDM yang kompeten. Akuntabilitas dalam sektor publik tidak hanya memerlukan instrumen teknologi, tetapi juga aktor yang mampu mengoperasikan sistem tersebut secara bertanggung jawab dan sesuai norma hukum yang berlaku.

5. Kesimpulan dan Saran

1. Implementasi sistem penggajian ASN di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi telah mencerminkan prinsip akuntabilitas publik melalui pelaporan yang tepat waktu, prosedur yang terdokumentasi, serta penggunaan aplikasi digital (SIPKD/SIPD).
2. Kompetensi pengelola keuangan dalam sistem penggajian menunjukkan kesiapan dari aspek teknis, regulatif, dan koordinatif yang mendukung efektivitas pelaksanaan sistem.
3. Kolaborasi antara sistem digital dan sumber daya manusia yang kompeten merupakan faktor penting dalam menciptakan pengelolaan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Saran bagi instansi adalah perlunya peningkatan infrastruktur teknologi dan pelatihan berkelanjutan bagi pengelola keuangan. Selain itu, penguatan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap proses penggajian diperlukan untuk menjaga konsistensi penerapan prinsip akuntabilitas.

6. Daftar Pustaka

- Binus University. (2021). *Akuntabilitas Laporan Keuangan Dalam Akuntansi Pemerintahan*.
<https://doi.org/https://accounting.binus.ac.id/2021/11/19/akuntabilitas-laporan-keuangan-dalam-akuntansi-pemerintahan/>
- Ditjen Perbendaharaan KEMENKEU RI KPPN Cilacap. (2019). *SDM yang kompeten*.
- International federation of accountants. (2025). *Kompetensi Utama bagi Profesional Keuangan Publik dalam Menanggapi Tantangan Saat Ini*.
- James. (2023). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENERIMAAN PENGGUNA WEBSITE MANNA KAMPUS MENGGUNAKAN MODEL PENDEKETAN MODIFIKASI UNIFIED THEORY OF ACCEPTANCE AND USE OF TECHNOLOGY 2 (UTAUT 2).
- Luqyana. (2022). KOMPETENSI APARATUR MEMPENGARUHINYA. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 7(1), 1.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*.
<https://id.scribd.com/document/372352449/Mardiasmo-akuntansi-Sektor-Publik>
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 71. (2010). *Standar akuntansi pemerintahan*.
<https://doi.org/https://peraturan.bpk.go.id/Details/5095/pp-no-71-tahun-2010>
- Ulisanti, L. (2021). HUMAN RESOURCE COMPETENCE AS A MODERATING VARIABLE FOR THE QUALITY OF LOCAL GOVERNMENT FINANCIAL REPORTS. *Business and Accounting Research (IJEBAR) Peer Reviewed-International Journal*, 5. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/IJEBAR>